



DINAMIKA LANSKAP, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, DAN ANALISIS JARINGAN KEBIJAKAN DI KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU

Hak cipta milik IPB University

ADIWIJOYO



**ILMU PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Dinamika Lanskap, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Analisis Jaringan Kebijakan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2026

Adiwijoyo
P0502222048

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



RINGKASAN

ADIWIJOYO. Dinamika Lanskap, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Analisis Jaringan Kebijakan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dibimbing oleh HERI PURNOMO dan SURIA DARMA TARIGAN.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan banyak aktor, mulai dari petani lokal hingga perusahaan besar dan pelaku politik. Kejadian karhutla berulang setiap tahun, pada 2019 tercatat sebagai karhutla yang terluas akibat ulah manusia setelah peristiwa karhutla tahun 2015, yang mana kabut asapnya menyelimuti delapan, mengakibatkan lebih dari 900.000 kasus penyakit pernapasan, menghentikan operasi bandara, meliburkan ratusan sekolah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta menimbulkan kerugian ekonomi sebesar US\$ 5,2 miliar. Pembakaran lahan umumnya dipilih sebagai metode murah untuk membuka lahan, khususnya gambut, yang kemudian dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit atau hutan tanaman industri, sehingga perubahan tutupan lahan secara langsung berkontribusi pada peningkatan risiko dan sebaran titik panas (*hotspot*) di suatu wilayah.

Berbagai regulasi telah diterbitkan secara berjenjang untuk mengendalikan karhutla, mulai dari perjanjian internasional AATHP yang diratifikasi Indonesia pada 2014, hingga undang-undang nasional seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Regulasi tersebut kemudian diturunkan ke tingkat provinsi dan kabupaten, salah satunya melalui Peraturan Bupati Pelalawan No. 73 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Perkebunan Sawit Berkelanjutan. Analisis jaringan kebijakan dalam penelitian ini bertujuan memetakan keterkaitan dan konsistensi antarregulasi pada berbagai tingkatan sekaligus mengidentifikasi celah atau tumpang tindih yang berpotensi melemahkan efektivitas pengendalian karhutla di lapangan.

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang menyumbang 20,1% produksi CPO nasional. Menggunakan pendekatan penelitian campuran (*mixed method*), kajian ini mengintegrasikan analisis spasial sebaran *hotspot* dan perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu dengan kajian implementasi kebijakan *zero burning*. Data *hotspot* digunakan untuk mengidentifikasi pola dan konsentrasi kejadian karhutla, sementara analisis tutupan lahan digunakan untuk menelusuri korelasi antara konversi lahan dan peningkatan kerentanan terhadap kebakaran. Meski sudah 25 tahun reformasi dan diterapkannya berbagai skema sertifikasi, karhutla masih terus terjadi, menunjukkan bahwa tantangan tata kelola lingkungan di sektor perkebunan membutuhkan pendekatan kelembagaan yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods triangulation* yang mengintegrasikan analisis spasial, analisis statistik, dan analisis kelembagaan untuk mengkaji dinamika lanskap, pola kebakaran hutan dan lahan, serta jaringan kebijakan di Kabupaten Pelalawan. Analisis spasial dilakukan menggunakan data tutupan lahan KLHK periode 1996–2022, data *hotspot* MODIS Terra dan Aqua tahun 2000–2024, serta *Emerging Hotspot Analysis* (EHSA) berbasis *Space Time Cube* untuk mengidentifikasi pola spatio-temporal kebakaran. Selanjutnya dilakukan analisis *Policy Network Analysis* (PNA) dengan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) terhadap 53 instrumen kebijakan untuk mengidentifikasi

struktur dan regulasi yang paling berpengaruh dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Analisis tersebut diperkaya melalui survei terhadap 44 responden menilai komitmen implementasi kebijakan menggunakan skala *Likert*, sedangkan efektivitas kebijakan dievaluasi menggunakan paired t-test untuk membandingkan kejadian hotspot sebelum dan sesudah tahun 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pelalawan mengalami transformasi lanskap yang signifikan dari dominasi hutan alam menuju lanskap budidaya, yang diikuti dengan pergeseran risiko kebakaran ke wilayah perkebunan dan hutan tanaman. Analisis EHSA mengidentifikasi kelas *Oscillating Hotspot* sebagai pola kebakaran yang paling dominan, menandakan bahwa risiko kebakaran bersifat berulang dan dinamis. Dari sisi kelembagaan, UU No. 32 Tahun 2009 menjadi regulasi paling sentral dalam jaringan kebijakan, sedangkan Permentan No. 11 Tahun 2015 tentang ISPO berperan sebagai penghubung utama antarsektor. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kekuatan struktur kebijakan dan implementasinya di lapangan, terutama pada aspek koordinasi, pengawasan, dan dukungan terhadap praktik pembukaan lahan tanpa bakar. Hasil paired t-test menunjukkan bahwa jumlah hotspot menurun secara signifikan setelah tahun 2016 ($t = 3,931$; $p = 0,0023$), namun dominasi pola *Oscillating Hotspot* mengindikasikan bahwa risiko kebakaran belum hilang. Oleh karena itu, pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu diarahkan pada pendekatan pencegahan berbasis lanskap melalui prioritas penanganan wilayah *Oscillating Hotspot*, penguatan koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, penyempurnaan regulasi teknis, serta penyelesaian persoalan tenurial guna mewujudkan tata kelola karhutla yang lebih efektif, antisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, titik panas, analisis jaringan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



SUMMARY

ADIWIJOYO *Landscape Dynamics, Wildfires, and Policy Network Analysis in Pelalawan Regency*. Supervised by HERI PURNOMO and SURIA DARMA TARIGAN.

Forest and land fires (karhutla) in Indonesia are a complex problem involving many actors, from local farmers to large corporations and political figures. These fires recur annually, with 2019 marking the worst human-caused outbreak on record, blanketing eight provinces in thick haze, causing over 900,000 respiratory illness cases, halting airport operations, forcing hundreds of schools to close across Indonesia, Malaysia, and Singapore, and generating economic losses of US\$5.2 billion. Burning remains a cheap and quick method to clear land—particularly peatlands for conversion into oil palm plantations or industrial timber estates, whereby changes in land cover directly contribute to the increasing risk and spread of hotspots across affected regions.

A layered set of regulations has been established to control forest fires, ranging from the international AATHP treaty ratified by Indonesia in 2014, to national laws such as Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law No. 41 of 1999 on Forestry. These regulations are further translated into provincial and district-level instruments, including the Pelalawan Regent Regulation No. 73 of 2020 on the Sustainable Palm Oil Plantation Action Plan. The policy network analysis in this study aims to map the linkages and consistency across these multi-level regulations, while identifying gaps or overlaps that may undermine the effectiveness of fire governance on the ground.

This study focuses on Pelalawan Regency in Riau Province, which contributes 20.1% of national CPO production. Using a mixed-method approach, the research integrates spatial analysis of hotspot distribution and land cover change over time with an assessment of zero-burning policy implementation. Hotspot data are used to identify patterns and concentrations of fire occurrences, while land cover analysis traces the correlation between land conversion and heightened fire vulnerability. Despite 25 years of reform and widespread adoption of certification schemes, fires continue to persist, indicating that environmental governance challenges in the plantation sector demand a far more comprehensive institutional approach.

This study employed a mixed-methods triangulation approach integrating spatial, statistical, and institutional analyses to investigate landscape dynamics, forest and land fire patterns, and policy networks in Pelalawan Regency, Indonesia. Spatial analysis was conducted using the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) land cover datasets for the period 1996–2022, MODIS Terra and Aqua hotspot data from 2000–2024, and Emerging Hot Spot Analysis (EHSA) based on the Space Time Cube framework to identify spatio-temporal fire patterns. Furthermore, Policy Network Analysis (PNA) using a Social Network Analysis (SNA) approach was applied to 53 policy instruments to identify the most influential policy structures and regulations governing forest and land fire management. These analyses were complemented by a questionnaire survey involving 44 respondents to assess policy implementation commitment using a

@Hak cipta milik IPB University

Likert scale, while policy effectiveness was evaluated through a paired t-test comparing hotspot occurrences before and after 2016.

The findings reveal that Pelalawan Regency has undergone substantial landscape transformation from predominantly natural forest ecosystems to commodity-based production landscapes, accompanied by a shift in fire risk toward plantation and industrial forest plantation areas. The EHSA identified the Oscillating Hot Spot class as the dominant fire pattern, indicating that fire occurrence is recurrent and spatially dynamic rather than persistent in fixed locations. From an institutional perspective, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management emerged as the most central regulation within the policy network, while Minister of Agriculture Regulation No. 11 of 2015 on the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification system served as the primary bridge connecting policy sectors. Nevertheless, a considerable gap remains between the structural strength of the policy framework and its implementation on the ground, particularly regarding inter-agency coordination, enforcement, and support for zero-burning land preparation practices. The paired t-test demonstrated a statistically significant decline in hotspot occurrences after 2016 ($t = 3.931$, $p = 0.0023$); however, the predominance of the Oscillating Hot Spot pattern indicates that fire risk has not been eliminated. Accordingly, forest and land fire management should be reoriented toward a landscape-based prevention strategy by prioritizing Oscillating Hot Spot areas, strengthening cross-sectoral coordination, empowering local communities, improving technical regulatory frameworks, and addressing underlying land tenure issues to establish a more effective, proactive, and sustainable fire governance system.

Keywords: forest and land fires, hotspot, policy network analysis



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2026
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



**DINAMIKA LANSKAP, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, DAN
ANALISIS JARINGAN KEBIJAKAN DI KABUPATEN PELALAWAN,
PROVINSI RIAU**

Hak cipta milik IPB University

ADIWIJOYO

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister pada
Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

**ILMU PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tim Penguji pada Ujian Tesis:

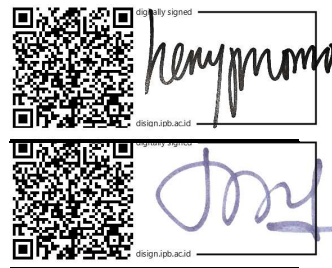
- 1 Prof. Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc
- 2 Prof. Dr. Efi Yulianti Yovi, S.Hut., M.Life.Env.Sc

Judul Tesis : Dinamika Lanskap, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Analisis Jaringan Kebijakan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Nama : Adiwijoyo
NIM : P0502222048

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Prof. Dr. Ir. Heri Purnomo, M.Comp.

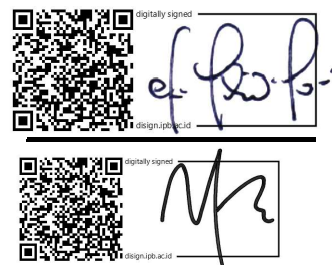
Pembimbing 2:
Prof Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M.Sc.



Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Prof. Dr. Efi Yuliati Yovi, S.Hut., M.Life.Env.Sc
NIP 197407241999032003

Dekan Sekolah Pascasarjana:
Prof. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc.
NIP 196607281991031002



Tanggal Ujian:
(1 Juli 2026)

Tanggal Lulus:
(tanggal penandatanganan oleh Dekan Sekolah Pascasarjana)



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 sampai bulan Desember 2025 ini ialah mengenai kebakaran hutan dan lahan, dengan judul "Dinamika Lanskap, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Analisis Jaringan Kebijakan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau".

Terima kasih penulis ucapkan kepada komisi pembimbing Prof. Dr. Ir. Heri Purnomo, M.Comp. dan Prof Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M.Sc. yang telah memberikan banyak saran dan membimbing. Di samping itu, penulis menyampaikan penghargaan kepada Prof. Dr. Efi Yuliati Yovi, S.Hut., M.Life.Env.Sc selaku ketua Program Studi PSL, yang telah membantu dan mendukung selama menjalankan studi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc yang telah bersedia menjadi penguji luar komisi pembimbing pada ujian tesis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Sekertariat PSL, yaitu Ibu Herlin dan Bapak Subur, yang selalu membantu dalam setiap kegiatan akademik dan administrasi selama menjalankan studi. Penulis juga menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau, serta berbagai instansi yang telah membantu dalam kegiatan pengambilan data di lapangan, antara lain BPN Provinsi Riau, Balai Besar KSDA Riau, BPBD, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni Daops Rengat, Balai Taman Nasional Tesso Nillo, Koramil dan Polres Pelalawan. Ucapan teima kasih juga penulis ucapkan pada teman-teman PSL angkatan 2022 atas kebersamaan dan kerja samanya selama perkuliahan yang memberikan dukungan kepada penulis.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada almarhum ayah, ibu, adik-adik, serta istri tercinta Wahyu Restiarini dan putra-putri kami Kalandra Dwipantara Adiwijoyo dan Arunika Kirana Adiwijoyo, atas segala doa, kasih sayangnya, semangat, dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Juli 2026

Adiwijoyo

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
1.5 Kerangka Pemikiran	5
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kebakaran Hutan dan Lahan: Faktor-Faktor Penyebab dan Dinamika Lanskap	8
2.2 Analisis <i>Spatio-temporal</i> Kebakaran Hutan dan Lahan	10
2.3 Kebijakan dan Regulasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	12
METODE	14
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	14
3.2 Alat dan Bahan	14
3.3 Tahapan Penelitian	15
3.4 Analisis Data	18
3.4.1 Analisis Spasial	18
3.4.2 Analisis Jaringan Kebijakan	19
3.4.3 Analisis Komitmen	20
3.4.4 Analisis Statistik Inferensial	21
3.4.4.1 Uji Normalitas	21
3.4.4.2 <i>Paired T-test</i>	22
HASIL	23
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
4.2 Hasil Analisis Spasial	24
4.3 Analisis Kelembagaan	38
4.4 Analisis Statistik Inferensial	45
4.5 Hasil Integrasi dan Triangulasi	49
PEMBAHASAN	54
5.1 Dinamika Lanskap dan Pola <i>Spatio-Temporal</i> Kebakaran	54
5.2 Jaringan Kebijakan, Komitmen Pemangku Kepentingan, dan Sintesis Triangulasi	56
5.3 Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan	58
SIMPULAN DAN SARAN	61
6.1 Simpulan	61
6.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

1	Ringkasan metode penelitian	17
2	Indikator komitmen para pemangku kepentingan	21
3	Perubahan Tutupan lahan Kabupaten Pelalawan tahun 1996 – 2006 (ha)	26
4	Perubahan Tutupan lahan Kabupaten Pelalawan tahun 2006 – 2015 (ha)	27
5	Perubahan Tutupan lahan Kabupaten Pelalawan tahun 2015 – 2020 (ha)	29
6	Perubahan Tutupan lahan Kabupaten Pelalawan tahun 2020 – 2022 (ha)	30
7	Luas Pola <i>Hotspot</i> di Kabupaten Pelalawan	34
8	Sepuluh Instrumen Regulasi dengan nilai Sentralitas Tertinggi	40
9	Daftar Institusi Asal Responden	42
10	Profil demografi responden	43
11	Persepsi aktor dalam pemerintahan terhadap kebijakan <i>zero burning</i>	43
12	Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk terhadap Selisih Rata-rata Jumlah <i>Hotspot</i> Antar-Kecamatan	46
13	Rata-rata <i>hotspot</i> sebelum dan sesudah 2016 per kecamatan	47
14	Ringkasan Hasil <i>Paired T-test</i> Intensitas <i>Hotspot</i> Sebelum dan Sesudah 2016	48
15	Perbandingan hasil <i>Paired T-test</i> dan Wilcoxon <i>Signed-Rank</i>	48
16	Sintesis hasil triangulasi temuan spasial, kebijakan, dan komitmen	51
17	Rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola karhutla di Kabupaten Pelalawan	59

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka Pikir Penelitian	7
2	Segitiga Api (Brown dan Davis 1973)	8
3	Peta Lokasi Penelitian di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau	14
4	Diagram tahapan penelitian	16
5	<i>Space Time Cube</i> (dimodifikasi dari ESRI)	19
6	Grafik arah sederhana	20
7	Persentase Perubahan Tutupan Lahan di Kabupaten Pelalawan Tahun 1996 – 2022	25
8	Peta Tutupan Lahan Tahun 1996	25
9	Peta Tutupan Lahan Tahun 2006	27
10	Peta Tutupan Lahan Tahun 2015	28
11	Peta Tutupan Lahan Tahun 2020	30
12	Jumlah titik panas (<i>hotspot</i>) di Kabupaten Pelalawan tahun 2000 – 2024	32
13	Jumlah titik panas (<i>hotspot</i>) di Kabupaten Pelalawan berdasarkan tutupan lahan	33
14	Peta Pola <i>Spatio-temporal Hotspot</i> di Kabupaten Pelalawan	33
15	Diagram Sankey Tutupan lahan tahun 2000, 2015 dan 2022 pada kluster <i>Hotspot</i>	35

16	Diagram Sankey Tutupan lahan tahun 2000, 2015 dan 2022 pada klaster <i>Coldspot</i>	36
17	Pola Distribusi <i>Hotspot</i> pada Penutup Lahan di tahun 2022 di Kabupaten Pelalawan	38
18	Jaringan Kebijakan dari Regulasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan	41
19	Histogram Sebaran Selisih Jumlah <i>Hotspot</i> dengan Kurva Normal	47
20	Grafik Q-Q Plot Selisih Jumlah <i>Hotspot</i> terhadap Distribusi Normal	47

DAFTAR LAMPIRAN

1	Kuesioner Persepsi komitmen pada institusi Publik	70
2	Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Pelalawan Tahun 1996 - 2006	75
3	Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2006 - 2015	76
4	Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 – 2020	77
5	Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 – 2022	78
6	Matriks <i>Emerging Hotspot Analysis</i> dengan tutupan lahan tahun 2022	79
7	Hasil <i>Policy Network Analysis</i> yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan	80
8	Hasil <i>Scoring</i> Responden	83